

**Konflik Sosial**  
**sebagai Implikasi Kerenggangan Hubungan Sosial dalam Masyarakat**  
*Social Conflict*  
*as Social Relation Gap Implication in Community*

**Soetji Andari**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Jl Kesejahteraan Sosial No 1  
 Nitipuran Yogyakarta. E-mail: <soetjiandari@gmail.com>. HP. 085643916275.  
 Diterima 10 Oktober 2013, direvisi 12 Februari, disetujui 28 Februari 2014.

**Abstract**

*Conflict is a situation of row or disharmony between the parties entering into a relationship or partnership. Various vulnerabilty and social conflict that occurred in Palu, Central Sulawesi, have a lot of social issues, such as Tiaka case, a conflict that happens between two groups of residents. Conflict in Palu district located at Tawanjuka District, which seen by many people as a conflict among intergroups in Nunu Village , West Palu Underdistrict, Palu Municipality, who had been in conflict with the residents in Tawanjuka Village, South Palu district. The conflict is triggered by several old cases, such as violence from other group and their close relative house had been outraged by other group. The problem is that the next generation revenge what other group did to them respectively and had never been overcome. To know the causal factors, the research is done through qualitative-descriptive approach, and data gathering through in-depth interview wth informants committed in the conflict. Still, data gathering are enriched through observation and documentary analysis.*

**Keywords:**

***Conflict-Implications-Gap-Social Relationship***

**Abstrak**

Konflik adalah situasi adanya pertentangan atau ketidakserasian antara pihak yang sedang membina hubungan atau kerjasama. Berbagai kerawanan dan konflik sosial yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah memiliki banyak persoalan sosial seperti kasus Tiaka, konflik antarwarga. Lokasi konflik yang terjadi di Palu terjadi di kecamatan Tawanjuka yang di sinyalir oleh banyak kalangan merupakan konflik bernuansa antarkelompok warga di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selama ini terlibat konflik dengan warga di Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Palu Selatan. Pemicu konflik berasal dari berbagai kasus lama yang tidak pernah ada penyelesaiannya, seperti kerabat pernah mengalami kekerasan dari kelompok lain, dan pemuda ingin melakukan balas dendam kejadian lampau yang belum terselesaikan. Untuk mengetahui berbagai faktor penyebab dan cara penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kota Palu maka dilakukan penelitian melalui wawancara mendalam, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif, pengumpulan data utama melalui dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan terkait konflik sosial, pengayaan data melalui observasi dan penelusuran data dokumen.

**Kata kunci:**

***Konflik–Implikasi–Kerenggangan–Hubungan Masyarakat***

**A. Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan, sangat rentan dengan perpecahan, sering kali terjadi berbagai gejolak konflik di berbagai daerah. Konflik adalah situasi adanya pertentangan atau ketidakserasian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Karena manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi sosial, konflik sesungguhnya menjadi sebuah realitas yang

tidak bisa dihindarkan, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman. Berbagai peristiwa kerusuhan selalu diawali dengan pertikaian antardua kelompok yang berbeda agama sehingga belarut dan berujung dengan terjadinya kerusuhan.

Warga Kelurahan Nunu, Palu Barat, dan Kelurahan Tawanjuka, Palu Selatan, Sulawesi Tengah, perang batu dan saling panah di perbatasan wilayah, kedua kelurahan ini bersebelahan. Warga tidak mengetahui siapa yang

memulai, tetapi berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga bentrokan ini dipicu oleh sejumlah orang bertopeng yang membakar rumah salah satu warga Kelurahan Tawanjuka. Warga dua kelurahan saling tuding dan bentrokan pun pecah akibat situasi yang memancing emosi kedua belah pihak, bahkan hanya dipicu oleh suara gas motor dan teriakan kata-kata kasar saja kedua belah pihak akan terpancing dan bentrok kembali, hal tersebut terjadi berulang kali karena warga yang bertikai mudah terprovokasi. Hal ini menambah peristiwa bentrok massa dengan nuansa ketegangan komunal di beberapa daerah, menyebabkan konflik horizontal, serupa yang terjadi di Tawanjuka cukup intensif di beberapa daerah di Palu.

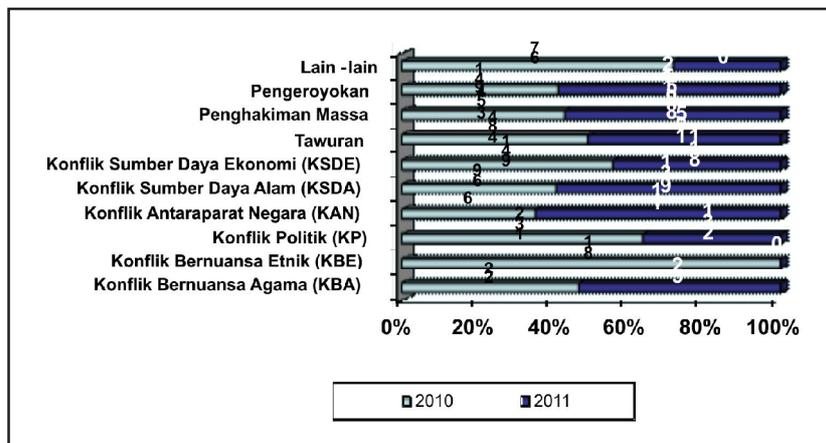
**B. Kajian Teoritik**

Konflik adalah ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu. Konflik juga berimplikasi pada kepentingan politik elite nasional, elite lokal dan miiter militer juga diduga menyulut terjadinya konflik horizontal sehingga sulit mencari penyelesaian yang lebih tepat, bahkan terkesan pihak aparat keamanan lamban menangani konflik tersebut, sehingga konflik terjadi belarut-larut dan memakan korban jiwa dan harta. Pemerintah pusat sudah menerbitkan Undang-undang yang dapat mencegah dan menangani konflik yang terjadi

di berbagai daerah di Indonesia. Studi konflik menjadi perhatian serius dan berkembang di Indonesia melalui beberapa peristiwa konflik kekerasan baik dalam dimensi etnis, agama, separatisme pascakekuasaan orde baru. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik (Kornblum, dalam Susan, 2009). Berbagai isu konflik terjadi di beberapa daerah di Indonesia dapat terlihat pada Tabel 1.

Konflik seringkali berkaitan dengan berbagai tindakan kekerasan untuk mencapai keinginan untuk menguasai baik materi maupun kekuasaan. Pada teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf membahas tentang intensitas bagi individu atau kelompok yang terlibat konflik. Dalam hal ini, intensitas diartikan sebagai suatu pengeluaran energi dan tingkat keterlibatan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi intensitas konflik, yaitu tingkat keserupaan konflik dan tingkat mobilitas. Teori Konflik Ralf Dahrendorf juga membicarakan tentang kekerasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsep tentang kekerasan, yaitu menunjuk pada alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengejar kepentingannya. Tingkat kekerasan mempunyai berbagai macam perwujudan. Teori konflik Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konsekuensi atau fungsi konflik dapat mengakibatkan pe-

Tabel 1.  
Isu Konflik di Berbagai Daerah di Indonesia



Sumber: Republika, edisi, 14 September 2013.

rubahan sosial. Khusus yang berkaitan dengan struktur otoritas, ada tiga tipe perubahan struktur, yaitu perubahan keseluruhan personil dalam posisi dominasi; perubahan sebagian personil dalam posisi dominasi, dan digabungkannya kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang mendominasi (Dahrendorf, 1986).

Dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi, Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan Undang-undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Semangat UU No 7 tahun 2012 lebih menekankan sisi pencegahan konflik daripada penanganan konflik. Isi dari undang-undang tersebut menyebutkan sejumlah poin yang perlu dilakukan dalam mencegah konflik, di antaranya memelihara kondisi damai di masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Selain itu, undang-undang tersebut menegaskan sejumlah hal yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian di masyarakat. Misalnya, dengan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati, mengakui, dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan persatuan atas dasar kebhinekaan, menghargai pendapat, dan kebebasan orang lain.

Wajah konflik di masyarakat tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan. Konflik dalam pelembagaan melibatkan kelompok-kelompok terkoordinasi (*imperatively coordinated association*) (Mc Quarie, 1995: 66). Menurut Dahrendorf konflik terjadi ketika manusia sebagai makhluk sosial mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar dominasi yang menguasai orang atau kelompok yang tidak mendominasi. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya, bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis (George Ritzer, 2003:153).

Konflik pada dasarnya tidak dapat dihindari, ada tiga istilah yang berkaitan dengan konflik

dihadapi, yaitu penyelesaian konflik, lebih merujuk pada sebab terjadinya pembasmian konflik, yaitu merujuk pada akibat dari konflik yang termanifestasikan pada sebab-sebab konflik, dan pengaturan konflik, yaitu berupa bentuk pengendalian konflik atau pengelolaan konflik yang lebih diarahkan pada manifestasi konflik daripada sebab-sebabnya. Dengan asumsi bahwa konflik tidak bisa diselesaikan, maka konflik dapat diatur sedemikian rupa dalam manajemen konflik (Anas Urbaningrum, 1999: 17-18).

Luas konflik menunjuk pada jumlah perorangan atau kelompok yang terlibat dalam konflik, serta menunjuk pada skala konflik yang terjadi. Misalnya, konflik lokal, konflik nasional, konflik internasional dan konflik agama. Intensitas konflik adalah sempit luasnya komitmen sosial yang bisa terbangun akibat sebuah konflik. Konflik yang intensitasnya tinggi adalah konflik yang bisa membangun komitmen sosial yang luas, sehingga luas konflik pun mengembang. Ketampakan konflik, adalah tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat di luar pihak yang berkonflik serta peristiwa konflik yang terjadi. Sebuah konflik dikategorikan mempunyai ketampakan yang tinggi manakala peristiwa konflik disadari dan diketahui detail keberadaannya oleh masyarakat secara luas. Sebaliknya, konflik memiliki ketampakan rendah manakala konflik terselamuti oleh berbagai hal sehingga tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat luas terhadap konflik itu pun sangat terbatas (Roger W.Cobb and Charles D. Elder dalam Eep Saefuloh Fatah, 1994: 43-45).

### C. Penggunaan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di Kota Palu terutama di daerah konflik yaitu di kecamatan Tavanjuka yang di sinyalir sebagai daerah rawan konflik bernuansa antarkelompok dengan warga di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat. Permasalahan konflik sosial yang dilihat dari latar belakang pemicu konflik

masyarakat yang terjadi antarwarga dianalisis secara holistik (utuh). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Data yang diperlukan adalah untuk mengetahui berbagai faktor penyebab dan cara penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kota Palu, dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua kelompok masyarakat yang berkonflik serta masyarakat yang mengetahui dan terlibat langsung dalam konflik yang terjadi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai konflik antarwarga yang terjadi di Palu, pengumpulan data dilakukan melalui telaah kepustakaan (dokumentasi) dari berbagai surat kabar.

**D. Hasil Penelitian: Konflik antara Masyarakat Tawanjuka dan Kecamatan Palu Barat**

Berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia berakibat bentrokan masa dengan nuansa ketegangan antar kelompok. Sepanjang tahun 2012 telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa paling sedikit 28 orang dengan korban luka serius lebih dari 200 orang. Selain itu masih ada kerugian material lainnya, seperti kerusakan harta benda atau kerugian non-material seperti kondisi psikis korban konflik sosial.

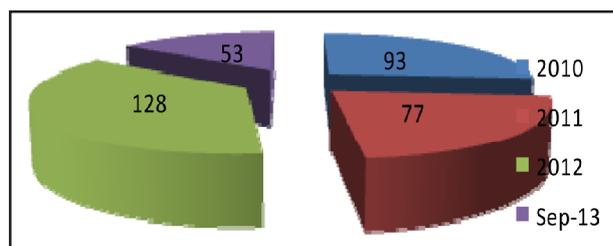
organisasi kemasyarakatan, aksi kekerasan unjukrasa menolak kenaikan bahan bakar minyak, bentrokan antarmassa pendukung calon kepala daerah, dan aksi massa terkait sengketa pertanahan.

Estimasi jumlah korban konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia, konflik sosial dengan nuansa ketegangan komunal sepanjang 2012, dilihat dari wilayah kejadian Provinsi Sulawesi Tengah menjadi yang terbanyak (15 kejadian), diikuti oleh Papua (6 kejadian), Lampung dan Aceh (masing-masing 5 kejadian), dan Kalimantan Timur pada bentrok di Barong Tongkok, Kutai Barat. Dari 32 konflik dan kekerasan di atas, alat kekerasan yang kerap digunakan adalah alat tradisional seperti panah dan parang, alat lain adalah senjata yang cukup modern dan membahayakan seperti bom dan senjata api rakitan. Akibat dari tindakan-tindakan ini selalu identik dengan dua hal, kerugian harta benda akibat pembakaran dan perusakan, dan korban manusia dalam bentuk nyawa dan luka-luka (Berita Palu, 27 November 2012).

Konflik sosial di Sulawesi Tengah memiliki banyak persoalan, seperti kasus Tiaka, yang merupakan konflik antarwarga di Palu. Salah satu konflik di Palu terjadi di kecamatan Tawanjuka, yang di sinyalir banyak kalangan adalah konflik bernuansa antarkelompok dengan warga di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat. Konflik antarwarga sebagai pemicu bentrokan dimulai dari perbincangan kasus lama, yang tiba-tiba memunculkan kembali emosi warga dan belum ada penyelesaiannya, seperti kerabatnya pernah mengalami kekerasan atau rumah keluarga dekat atau kerabat di rusak, dan pemuda ingin melakukan balas dendam kejadian lampau yang belum terselesaikan. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut di antaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan. Ciri-ciri individual yang dibawa serta dalam interaksi sosial, menjadi salah satu pemicu konflik dan merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, karena tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antaranggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya.

Tabel 2.

Konflik Sosial di Berbagai Daerah di Indonesia



Sumber: Puskomin Kementerian Dalam Negeri tahun 2013

Menurut Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kemendagri, tahun 2010 terjadi 93 peristiwa konflik. Sementara pada tahun 2011 terjadi 77 peristiwa dan 2012 terjadi 128 peristiwa. Di tahun 2013 hingga awal September, Kemendagri mencatat telah 53 peristiwa konflik. Sejak tahun 2010 hingga September 2013, tercatat 351 peristiwa konflik. Baik konflik yang bernuansa Sara, bentrokan warga dengan

Beberapa sumber informasi (informan) di lapangan mengemukakan, awal mula terjadi konflik karena perseteruan kecil, semacam perkelahian antarkelompok pemuda karena kesalahpahaman sehingga menjadi pemicu kerusuhan. Berbagai konflik terjadi karena adanya perseteruan akibat dari perebutan tanah dan juga perbedaan keyakinan yang membuat konflik menjadi meluas. Konflik meluas akibat dari ketidakpuasan dan salah satu pihak mengalami kekalahan dalam berbagai pemilihan misalnya pemilihan kepala desa hingga pemilihan walikota. Warga masyarakat yang tidak menerima hasil yang diinginkan biasanya menggalang kelompok untuk membuat keributan hingga perkelahian, baik antargolongan maupun antarwarga masyarakat, menyebabkan kerusuhan melibatkan banyak orang bahkan kelompok.

Pihak yang terlibat dalam konflik di Palu umumnya teridentifikasi sebagai anggota suatu komunitas berbasis teritorial, seperti kampung, dusun, atau kelurahan meski juga sebagian masalahnya juga tumpang tindih dengan identitas sosial, budaya (etnis maupun sub-etnis). Pemicu konflik lain yang muncul adalah kegagalan komunikasi akibat dari sengketa wilayah (adat) dan lahan, ketiadaan dan ketidakpuasan dalam penegakan hukum oleh negara terhadap peristiwa-peristiwa kriminal (cemburu, kalah bersaing, mabuk, kebut-kebutan, tawuran), beredarnya pesan-pesan provokatif, dan dendam konflik lama. Ada konflik yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (pemilukada), konflik antarkampung, hingga tawuran pelajar atau mahasiswa. Cara penyelesaian tiap kasus ini berbeda satu dengan lainnya, sehingga diperlukan *law enforcement* (penegakan hukum) yang tegas agar orang tidak mudah melakukan kekerasan. Perbedaan inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik sosial, sebab dalam menjalani sebuah pola interaksi sosial, tidak mungkin seseorang akan selalu sejalan dengan individu yang lain.

Menurut salah satu pemuda yang terlibat konflik, berbagai kelompok sebagai pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka. Konflik selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan sal-

ing tergantung, dapat pula melahirkan konflik baru (Gibson, *et.al.* (1997: 37). Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak saling bekerjasama satu sama lain. Konflik dapat menjadi masalah yang serius dalam setiap organisasi, tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas organisasi tersebut. Konflik tersebut mungkin tidak membawa "kematian" bagi organisasi, tetapi pasti dapat menurunkan kinerja organisasi bersangkutan jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Oleh karena itu, keahlian untuk mengelola konflik sangat diperlukan bagi setiap pimpinan atau manajer organisasi. Konflik merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Secara personal, konflik terjadi dalam rumah tangga. Dalam hubungan yang luas, konflik terjadi dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik, seperti tawuran pelajar, konflik industri dan agraria, konflik etnis dan sektarian, hingga konflik antarnegara.

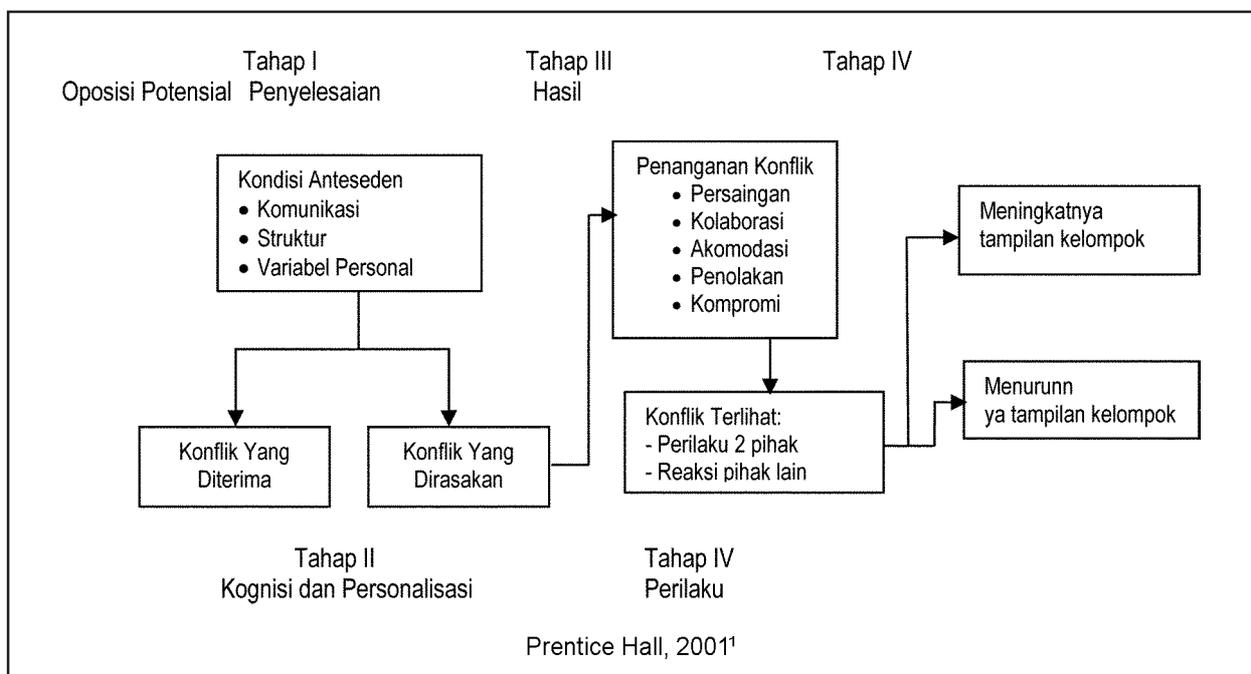
Konflik yang terjadi di Palu bersifat fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok, dan memperbaiki kinerja kelompok, sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang merintangikan pencapaian tujuan kelompok sehingga merugikan kelompok. Menurut Coser, konflik dapat diartikan sebagai proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan *struktur sosial*. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Dalam ruang lingkup kecil, karena konflik kelompok-kelompok baru dapat lahir dan mengembangkan identitas strukturalnya (Lewis A. Coser: 1956).

Menurut beberapa responden berbagai konflik yang terjadi di Palu biasanya antaretnik akibat perbedaan identitas sosial, etnik dan budaya khususnya seringkali menimbulkan etnosentrisme yang kaku. Hal ini terjadi pada seseorang yang tidak mampu keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu

memahami perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budaya. Menurut tokoh masyarakat setempat, konflik terjadi karena adanya bentrokan antarpemuda untuk memperebutkan hal yang sepele, seperti perempuan, saling mengejek, kemudian berlanjut dengan perkelahian antarkelompok yang kadang kala melibatkan anak di bawah umur. Hal tersebut memerlukan keterlibatan orang tua yang memegang peranan penting dalam bentrokan tersebut mengingat adanya indikasi keterlibatan anak di bawah umur dalam bentrokan itu.

Upaya mencegah terjadinya konflik, antara lain dengan saling menghormati antarmasyarakat sehingga memunculkan rasa menghormati orang lain, menjaga kerukunan antarwarga meskipun hal yang sulit dilakukan karena masyarakat terdiri dari ratusan suku yang memiliki ciri watak berbeda-beda. Apabila sudah terbentuk sikap saling menjaga dan mempertahankan kerukunan baik antarumat beragama, antaretnis, maupun antarsukubangsa yang kuat dari dalam diri masyarakat. Konflik antaretnik melewati beberapa tahap atau proses yang ditunjukkan pada bagan berikut.

Pada Tahap I konflik didorong oleh variabel anteseden atau variabel lain yang mendahului konflik: (1) komunikasi, misalnya memburuknya komunikasi antardua pihak yang terlibat konflik (tidak ada pertukaran informasi, salah paham, prasangka, dan lain-lain) (2) variabel struktur, misalnya berkaitan dengan pola-pola interaksi dalam sistem atau di luar sistem (3) variabel personal, yang berkaitan dengan beragam faktor individu dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Pada Tahap II, dua pihak berhadapan dengan kognisi dan personalisasi. Artinya, dua pihak sudah memiliki pengetahuan tentang keadaan personal masing-masing yang terlibat konflik. Akibatnya, dua pihak akan menerima konflik sebagai konflik yang berterima dan konflik yang dirasakan. Konflik berterima adalah konflik nyata, riil, sedangkan konflik yang dirasakan hanya berkaitan dengan suasana batin dari dua pihak akibat tidak adanya komunikasi. Tahap III, mulai tampak "pemilahan" sikap antara dua pihak (sikap mengutamakan diri sendiri atau mengutamakan orang lain), yang dirasakan atau dinyatakan dalam bentuk saling menolak untuk menyelesaikan konflik, membiarkan keadaan



1) Alo liliweri,2005, Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Multikultur, Yogyakarta, LkiS, hal 274

untuk bersaing, melakukan kolaborasi, akomodasi, atau berkompromi. Tahap IV dan tahap V perilaku yang ditunjukkan dapat meningkatkan tampilan kelompok dan juga menurunkan tampilan kelompok tergantung dari upaya yang dilakukan oleh ikatan kelompok tersebut.

Secara struktural, konflik yang terjadi di Palu terutama di kecamatan Tawanjuka menurut beberapa tokoh masyarakat, dapat mengubah keseimbangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok minoritas, sehingga masyarakat sekitar dalam setiap gerak kehidupan dihindangi rasa curiga. Hal ini menimbulkan implikasi pada terjadinya ketidakcocokan antarnilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya kestabilan emosi sehingga mempengaruhi pada efisiensi dan produktivitas kerja.

Alo Liliweri (2005: 264-265) menuliskan beberapa jenis atau tipe konflik, di antaranya konflik sederhana, konflik personal versus diri sendiri, terjadi karena apa yang dipikirkan/diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, bersumber dari perbedaan karakteristik personal dan perbedaan keyakinan kelompok/masyarakat atau perbedaan hukum. Selain itu konflik berdasarkan jenis peristiwa dan proses karena kesalahpahaman yang didorong oleh faktor emosi. Konflik *zero-sum (game)*, konflik yang hasilnya kemenangan di satu pihak dan kekalahan di pihak lain. Konflik yang merusak, mulai dari proses sampai hasilnya merusak relasi social. Bentuk atau tipe-tipe konflik meliputi:

1. *Kompetisi*, Yaitu hubungan dan interaksi sosial yang mewujudkan persaingan antara seseorang atau sekelompok orang, atau sekelompok orang lain, dengan tujuan mengalahkannya.
2. *Sengketa*, Yaitu hubungan dan interaksi sosial yang terwujud karena adanya seseorang atau sekelompok orang memperebutkan sumber daya yang terbatas dan berharga dari orang sekelompok orang lain.
3. *Balas dendam*, Bila suatu sengketa berlarut-larut dan dalam perkembangan persengketaan tadi jatuh korban, maka sengketa dapat berubah menjadi balas dendam.

4. *Perang*, Suatu interaksi atau hubungan sekelompok orang dengan sekelompok orang lain, dengan tujuan untuk saling memusnahkan dan menghancurkan. Perang biasanya terjadi karena adanya perbedaan mendasar dalam sistem ideologi dari masing-masing kelompok yang berperang.

Konflik yang terjadi di Palu dapat dilihat dari sisi komunikasi serta akibat hubungan sosial yang kurang harmonis dan didukung dengan latar belakang konflik sebelumnya dan juga motif dendam. Konflik juga meningkatkan perhatian masyarakat terhadap hal yang dipersengketakan dalam konflik, seperti perebutan baik batas desa maupun perebutan lahan kekuasaan yang berimplikasi langsung pada meningkatnya media massa untuk memberitakannya, memungkinkan masyarakat memperoleh informasi baru, dan mengubah pola komunikasi. Dari sisi komunikasi, konflik meningkatkan perhatian masyarakat terhadap hal yang dipersengketakan, meningkatkan media massa untuk memberitakannya, memungkinkan masyarakat memperoleh informasi baru, dan mengubah pola komunikasi berkenaan dengan hal tersebut. Secara struktural, konflik dapat mengubah keseimbangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok minoritas. Konflik meningkatkan solidaritas, terutama memantapkan solidaritas di antara kelompok minoritas.

Konflik sosial di Palu umumnya berlatar belakang isu Sara, sengketa lahan, tapal batas daerah, dan perbedaan nilai dan ideologi karena setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup, perbedaan perspektif tersebut disebabkan perbedaan latar belakang dan karakter. Konflik sosial mengakibatkan terhentinya kerja sama yang sebelumnya terjalin di antara pihak yang terlibat konflik. Lebih buruk lagi, konflik yang disertai dengan kekerasan sering kali mengakibatkan hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada dua macam konflik, yaitu konflik fungsional dan konflik destruktif. Konflik fungsional adalah konflik yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Konflik ini biasanya terjadi tanpa diwarnai kekerasan. Konflik destruktif adalah konflik yang merusak kehidupan sosial, umum-

nya disertai dengan kekerasan sehingga sering disebut sebagai kekerasan sosial.

Konflik sosial yang terjadi di Palu membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat sekitar akibat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Gesekan sosial tersebut dapat menjadi konflik antarwarga, baik bersifat sporadis maupun potensial dalam satu titik yang dapat berujung pada tawuran antarwarga (desa). Transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang terbuka akibat semakin cepatnya dinamika sosial, juga menyebabkan perubahan sosial yang memunculkan kerawanan konflik baik vertikal maupun horisontal. Akibat dari konflik sosial yang terjadi mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologi sehingga menghambat terwujudnya kedamaian di setiap daerah. Berbagai sisi konflik yang terjadi dimulai dari konflik kecil atau perorangan, konflik antarkeluarga, sampai dengan konflik antarkampung/desa dan bahkan sampai konflik komunal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial.

Berbagai konflik yang terjadi di Palu tidak berbeda jauh dengan konflik yang terjadi di Indonesia, akibat dari konflik massal yang terjadi seperti perkelahian antarwarga tidak terjadi begitu saja, tetapi diawali dengan adanya benih-benih yang mengendap di dalam individu, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik. Bentrokan warga Nunu dan Tavanjuka, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dipicu akibat tewasnya seorang warga Tavanjuka saat terjadi tawuran antarkampung, se usai pemakaman dilanjutkan dengan saling serang, kedua warga kembali bentrok. Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, melainkan juga faktor-faktor yang dapat menjadi sumber timbulnya konflik.

Isu konflik yang terjadi di Palu salah satu akar permasalahannya adalah faktor deprivasi antarkelompok masyarakat dan faktor dominasi sosial, politik, dan agama. Faktor pemicu konflik

antaretnik mungkin dimunculkan secara sengaja oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penguasaan sumber daya tertentu yang diinginkan oleh beberapa pihak mungkin menjadi salah satu sebab yang membuat pihak-pihak yang terlibat menggunakan konflik antaretnik sebagai jalan untuk memenangkan persaingan. Hal ini bisa dilihat dari siapa yang mendapatkan keuntungan dari adanya konflik.

Salah satu analisis yang didasarkan pada berbagai perspektif terjadinya konflik di Palu menunjukkan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja mengorganisir terjadinya kekerasan. Analisis terhadap berbagai konflik disinyalir akibat terjadi perebutan sumber daya ekonomi yang semakin terbatas. Saat sumber daya ekonomi melimpah dan mudah didapatkan, konflik dapat dihindarkan. Akan tetapi begitu sumberdaya ekonomi semakin terbatas dan semakin banyak orang memperebutkannya, terjadi kompetisi perebutan sumberdaya. Sebagai konsekuensi logis dari adanya kompetisi perebutan sumber daya adalah terciptanya prasangka antaretnik. Prasangka antaretnik terutama pada kelompok dominasi akan berkembang terhadap etnik lain yang tersubordinasi menjadi justifikasi kekerasan terhadap etnik tersebut.

Berbagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Palu sudah sering kali dilakukan oleh berbagai unsur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat melalui jalur adat. Semua alternatif tersebut dilakukan agar dapat menumbuhkan relasi adat yang dihormati oleh seluruh masyarakat yang berkonflik. Jalur adat yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan deklarasi kearifan lokal, merupakan kesepakatan warga dalam rangka mengurangi terjadinya bentrokan, konflik dan tercipta kedamaian. Selain penyelesaian konflik lewat jalur adat, dibangun pula alternatif yang bisa menumbuhkan relasi sebagaimana relasi adat. Deklarasi ini dihadiri tokoh adat dan agama, tokoh pemuda, pejabat Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, serta perwakilan masyarakat.

Beberapa penyelesaian konflik telah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan. Namun usaha ini tak kunjung menampakkan hasil nyata. Oleh sebab itu, deklarasi kearifan lokal

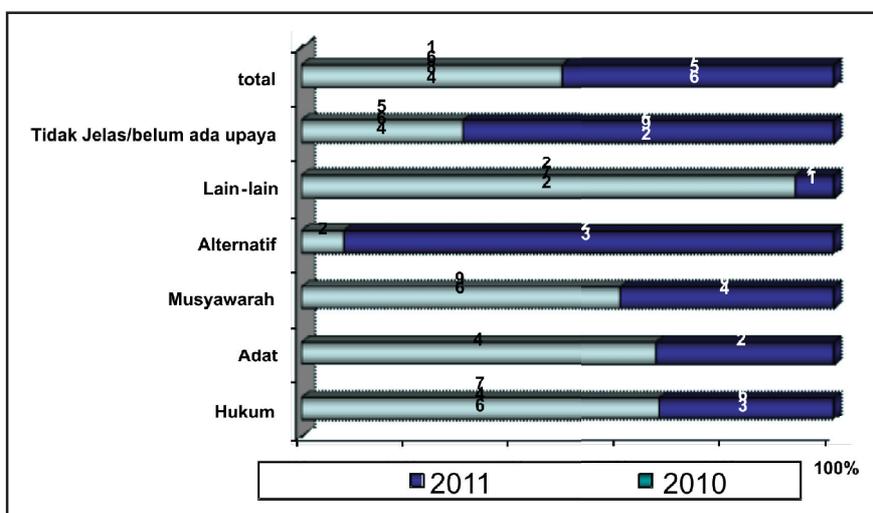
yang lebih menekankan pada penyelesaian adat dan diharapkan dapat menyadarkan kembali warga agar mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan perlu dilakukan. Penyelesaian konflik telah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan. Kementerian Sosial melalui Bantuan Keserasian Sosial berupaya untuk mengurangi konflik yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan fisik dan nonfisik yang direncanakan, dikerjakan, dimanfaatkan, dan dipelihara oleh masyarakat setempat secara bersama-sama. Oleh sebab itu, deklarasi kearifan lokal yang lebih menekankan penyelesaian adat diharapkan dapat menyadarkan kembali warga agar mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan.

Upaya penyelesaian konflik sosial pada tabel 3 di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat bahwa penyelesaian melalui jalur hukum terdapat 746 kasus, sedangkan pada tahun 2011 363 kasus. Kasus konflik sosial yang terjadi 70 persen diselesaikan melalui jalur hukum, sedangkan tahun 2011 penyelesaian melalui jalur hukum 30 persen. Demikian pula penyelesaian masalah melalui jalur adat dan musyawarah. Hal tersebut terjadi karena konflik sosial yang terjadi pada tahun 2010 banyak yang berkaitan dengan kasus sengketa tanah yang memerlukan penegasan

pada jalur hukum, jalur adat dan musyawarah. Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, di samping fungsi lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Data tersebut menjelaskan upaya penyelesaian masalah melalui berbagai jalur lebih banyak dilakukan pada tahun 2010 dibandingkan pada tahun 2011, kecuali penyelesaian masalah konflik sosial melalui jalur alternatif.

Penyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapa daerah di Palu, menurut ketua dewan adat bahwa penyelesaian konflik sosial tersebut perlu hukum dan sanksi adat yang bertujuan untuk menjunjung kearifan lokal di daerah rawan konflik. Selain itu, ikrar bersama juga bertujuan untuk menegakkan budi pekerti dan menghindari tindakan tidak terpuji. Menurut Durkheim masyarakat menerapkan hukum yang bersifat menekan (*repressive*), dan menerapkan sanksi tersebut tidak atas pertimbangan rasional mengenai jumlah kerugian obyektif yang menimpa masyarakat, tetapi atas dasar kemarahan kolektif yang muncul karena tindakan yang menyimpang dari pelaku. Be-

Tabel 3.  
Upaya Penyelesaian Konflik Sosial Berbagai Daerah



Sumber: Republika edisi Sabtu, 14 September 2013, 20:17 WIB

berapa sanksi yang disebutkan dalam deklarasi adat, antara lain ditenggelamkan di laut, diusir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat, dan mengganti atau membayar denda berupa hewan serta perlengkapan adat.

Beberapa sanksi yang dilakukan apabila ada warga yang melanggar aturan adalah sanksi adat yang sudah disepakati. Masyarakat ingin memberi pelajaran kepada pelaku dan juga peringatan anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Menurut beberapa tokoh masyarakat pemberian sanksi adat kepada pelaku bentrok dinilai lebih efektif dibandingkan sanksi hukum positif. Tokoh masyarakat dari berbagai pihak mengajak warganya untuk kembali membangun kerukunan yang dilandasi ketulusan dan jiwa yang bersih, serta menghilangkan dendam di dalam hati.

Deklarasi Kearifan Lokal yang diikrarkan tokoh adat itu dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Untuk mempertahankan kearifan lokal melalui harmonisasi sosial adalah dikondisikan terpeliharanya perdamaian di masyarakat, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal. Nilai-nilai harmonisasi sosial adalah keadilan, kesetaraan, kasih sayang, kepercayaan, penghormatan, dan toleransi. Nilai tersebut diwujudkan dalam interaksi di masyarakat sehingga terbangun kohesivitas sosial di antara orang-orang di dalamnya. Dalam mengatasi konflik sosial salah satu caranya adalah dengan memfasilitasi kebutuhan warga untuk mewujudkan kehidupan yang serasi di tengah-tengah masyarakat.

Upaya penyelesaian konflik antarwarga di dua kelurahan bertetangga di Palu dilakukan melalui pendekatan agama, selain itu keterlibatan orang tua juga memegang peranan penting dalam bentrokan tersebut mengingat adanya indikasi keterlibatan anak di bawah umur. Berbagai upaya pencegahan konflik berupaya menciptakan kembali tenggang rasa di antara warga, menghidupkan rasa saling percaya, serta menumbuhkan kepekaan sosial agar terjalin harmonisasi antarwarga. Keserasian sosial harus terbangun kembali, karena ini salah satu cara mengintegrasikan warga. Dengan sejumlah aturan formal, sanksi dan hukum adat yang telah ditetapkan, termasuk program pemberdayaan

sosial yang digulirkan pemerintah, diharapkan konflik sosial di Palu dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga harmonisasi sosial yang diharapkan semua pihak dapat tercipta.

Penyelesaian konflik sosial juga dapat dilakukan melalui pembinaan masyarakat agar terjadi pembauran dari dua komunitas yang bertikai, kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan kembali sistem keamanan lingkungan sebagai daya tangkal masyarakat guna mencegah dan menanggulangi konflik yang akan terjadi. Namun upaya pencegahan terjadinya konflik sosial melalui kemauan warga masyarakat untuk menghilangkan rasa curiga dan kecemasan yang berlebihan dalam kehidupan bermasyarakat, menumbuhkan rasa kepercayaan antarkelompok dan antarwarga untuk dapat hidup damai, juga perlu dilakukan. Menumbuhkan rasa percaya antarwarga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat agar tidak mudah termakan isu, provokasi yang dapat menimbulkan bentrok massa. Menanamkan kepedulian masyarakat akan kebutuhan keamanan dan ketertiban di lingkungannya dengan melaporkan setiap kejadian yang berdampak kerusuhan antarwarga juga merupakan hal lain yang perlu dilakukan. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kedamaian, mengundang tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang bertikai agar menciptakan suasana damai di masyarakatnya, juga merupakan hal lain yang tidak kalah penting dilakukan.

## **E. Penutup**

Konflik sosial yang terjadi di Palu akibat keberagaman masalah sehingga menimbulkan krisis yang berkepanjangan menyebabkan: mudahnya terbakar tingkat emosi warga karena rendahnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga barang kebutuhan pokok, masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan; Adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja mengorganisir terjadinya kekerasan akibat terjadi perebutan sumber daya ekonomi yang semakin terbatas menyebabkan terjadinya konflik; Sebagian besar timbul perilaku anarkisme, terorisme, sekularisme, primordialisme, separatisme, yang dilakukan oleh beberapa pihak mengakibatkan pertentangan yang terjadi antarwarga yang

berbeda keyakinan. Keresahan yang terjadi di masyarakat mengganggu ketenangan sehingga menjadi gelisah dan takut untuk beraktifitas; Pertentangan dan konflik antarelite dan golongan politik, terutama pasca pilkada menghambat jalannya roda pemerintah dan pelaksanaan pembangunan; Terjadi perubahan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, perubahan pranata dan lembaga sosial, perubahan pandangan hidup, perubahan sistem dan struktur pemerintahan, yang mengakibatkan timbul kebingungan di masyarakat; Berbagai konflik yang terjadi akan memecah-belah organisasi dan menghambat terciptanya kinerja yang optimal. Konflik memberikan indikasi tentang adanya ketidakberesan dalam organisasi, dan adanya prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Beberapa penyelesaian konflik telah dilakukan dengan berbagai cara antara lain, rekonsiliasi dan berdialog dengan semua pihak yang bersengketa termasuk dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan dinas instansi terkait. Menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan. Mendeklarasikan kearifan lokal yang lebih menekankan penyelesaian adat diharapkan dapat menyadarkan kembali warga agar mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan. Pemberian sanksi adat kepada pelaku bentrok dinilai lebih efektif ketimbang sanksi hukum positif. Menciptakan kembali tenggang rasa diantara warga, menghidupkan rasa saling percaya, serta menumbuhkan kepekaan sosial agar terjalin harmonisasi antarwarga. Mengundang tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang bertikai agar menciptakan suasana damai di masyarakatnya.

#### **Pustaka Acuan**

- Abdullah, Irwan, (2010), *Konstruksi dan Re-produksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anas Urbaningrum, (?) *Ranjau-ranjau Reformasi, Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Coser A Lewis, (1956), *The Fungtions of Sosial Conflict*, NewYork: The Free Press.
- Dahrendorf , Ralp, (1986). *Konflik dan konflik dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali Pers.
- George Ritzer, (2003), *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press.
- Gibson, James L. *et al.*, (1977), *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Alih bahasa oleh Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Ismail, Nawawi, 2011, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal : Dialog Agama dan Per-*
- Jhonson, Doyle Paul, (1986), *Sociological Theory: Classical Founders and Contemporary Perspective*, Robert MZ Lawang (pentj.), jilid I, Jakarta: Gramedia.
- Liliwari, Alo, (2005). *Prasangka dan Konflik*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Mappangara, Suriadi, (2010), *Respons Mili-ter terhadap Konflik Sosial di Poso*. Palu Sulawesi Tengah: Yayasan Bina Warga (YBW).
- Poloma, M, Margaret (2010), *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susan, Novri, (2010), *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wirawan, I.B. (2012). *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencan
- Eep Saefulloh Fatah, (1994), *Menejemen Konflik dan Demokrasi*, Jakarta: Prisma No. Tahun XXIII, Agustus 1994.
- Elkana Lengkong, (2013), *Adakah Provokator di balik Bentrok Warga di Kota Palu dan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah?* Jakarta: Harian Republika, edisi 23 June 2013.